BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Pendapatan Jawa Timur diantaranya sebagai berikut :

1. Tata cara penetapan dan penerbitan pajak yang dikenakan kepada obyek pajak yaitu kendaraan bermotor telah sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Pasal 6 ayat 1.
2. Mekanisme Penerbitan Surat-Surat perpajakan yaitu :

   a. Penerbitan SPKPKB (Surat Pemberitahuan Pemilik Kendaraan Bermotor) 14 hari sebelum berakhirnya masa pajak.
   b. Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 1 hari setelah masa pajak.
   c. Penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 30 hari setelah diterbitkan SKPD.
   d. Penerbitan SP1 (Surat Peringatan Pertama) 14 Hari setelah diterbitkan STPD
   e. Penerbitan SP2 (Surat Peringatan Kedua) 21 Hari setelah dietrbitkan Sp1.

3. Format formulir STPD (SuratTagihanPajak Daerah) pada bagian penstatusan kendaraan bermotor yang untuk diserahkan kepada wajib

pajak masih terdapat sestatus pindah Alamat dimana status tersebut tidak terdapat pada Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan yang digunakan oleh petugas dinas luar dan penagihan untuk penetapan Status Kendaraaan bermotor.

5.2 Saran

Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan di UPTD Surabaya Timur sudah cukup baik, saran yang di berikan untuk UPTD Surabaya Timur adalah pengiriman surat SPKPKB kepada wajib pajak harus dipastikan terkirim UPTD Surabaya Timur dapat menggunakan media yang lebih modern misal dengan media elektronik atau informasi internet lainnya untuk memastikan tersampainya pemberitahuan pertama atas pajak kendaraan bermotor terhadap Wajib Pajak kemudian, untuk format formulir STPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) bisa di perbarui sehingga sesuai degan format penstatusan yang ada di dalam software SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan).

DAFTAR PUSTAKA

KEP-116/PJ/2010, Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, 2010. Tentang Peyunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jwa Timur.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : CV Andi Offset.

KEP-452/PJ/2011**,** Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provisi Jawa Timur, 2011. Petunjuk Teknis Penerbitan Dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Kepada Wajib Pajak.

Rochmat Soemi. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Eresco.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.